

Profesionalisme Militer Indonesia: TNI Hadapi Era Baru

Category: NASIONAL

written by Redaksi | June 27, 2026



SEANTERONEWS.com – Perkembangan dinamika geopolitik global saat ini menuntut perubahan mendasar pada cara pandang terhadap kekuatan pertahanan sebuah negara.

Di era modern, tugas tentara nasional tidak lagi sekadar bersiap menghadapi peperangan konvensional antarnegara. Spektrum ancaman yang dihadapi dunia saat ini telah meluas secara signifikan, mencakup serangan siber, terorisme lintas batas, perubahan iklim, krisis pangan, pandemi global, hingga kerentanan pasokan energi.

Menyikapi kompleksitas tersebut, Marsekal Muda (Marsda) TNI Dr. Budhi Achmadi memberikan ulasan teoretis dan praktis melalui karya ilmiahnya yang bertajuk “Profesionalisme Militer Lama dan Baru: Dalam Perspektif Indonesia”. Dalam analisisnya,

ia menyoroti perlunya militer [Indonesia](#) merevolusi cara pandang mengenai definisi profesionalisme agar tetap relevan dengan kebutuhan strategis negara.

Menimbang Perspektif Profesionalisme Klasik dan Modern

Untuk memahami dinamika ini, Budhi membandingkan dua teori besar dalam studi hubungan sipil-militer:

Konsep Klasik (Old Professionalism)

Dirumuskan oleh ilmuwan politik Samuel P. Huntington dalam bukunya *The Soldier and the State*, konsep ini bertumpu pada tiga elemen utama: keahlian (expertise), tanggung jawab (responsibility), dan semangat korps (corporateness). Huntington menekankan prinsip objective civilian control, di mana militer profesional harus berkonsentrasi penuh pada fungsi pertahanan eksternal, menjauhi urusan politik dalam negeri, dan patuh di bawah kendali otoritas sipil yang sah.

Konsep Baru (New Professionalism)

Dikembangkan oleh Alfred Stepan dalam karya *The New Professionalism of Internal Warfare and Military Role Expansion*, pendekatan ini menawarkan sudut pandang yang lebih luas, terutama bagi negara-negara berkembang. Stepan melihat bahwa peran militer dapat diperluas untuk mengamankan stabilitas internal, menjaga integrasi nasional, serta berpartisipasi aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Menurut Budhi, seiring kaburnya batas antara ancaman militer dan nonmiliter, militer modern harus mampu beroperasi secara multidomain. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Berbagai negara maju dan berkembang telah mengadaptasi konsep ini:

India melatih militernya untuk penanganan bencana dan

pembangunan di wilayah terisolasi.

Brasil mengerahkan angkatan bersenjataanya untuk menjaga ekosistem strategis Amazon dan melakukan operasi kemanusiaan.

Korea Selatan mensinergikan kekuatan militer dengan riset teknologi teknologi tinggi.

Amerika Serikat memperluas kapabilitas pasukannya di sektor logistik nasional, keamanan siber, dan mitigasi bencana tanpa merusak supremasi sipil.

Relevansi Indonesia dan Mandat Undang-Undang

Sebagai negara kepulauan terbesar yang berada di persimpangan rute perdagangan global, Indonesia memiliki kerentanan strategis yang tinggi. Mulai dari ancaman keamanan maritim, serangan siber pada infrastruktur vital, hingga potensi bencana alam yang tinggi karena berada di cincin api (ring of fire).

Budhi berpendapat bahwa membatasi definisi profesionalisme TNI hanya pada kesiapan tempur tradisional adalah pendekatan yang kurang adaptif.

Konstitusi dan regulasi nasional sesungguhnya telah mengakomodasi hal ini. Melalui Undang-Undang TNI, negara telah memandatkan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tugas ini meliputi penanggulangan dampak bencana, pemberantasan terorisme, pengamanan wilayah perbatasan, bantuan kemanusiaan, hingga dukungan logistik pada saat krisis nasional.

Pengalaman Indonesia dalam menghadapi pandemi beberapa waktu lalu membuktikan bagaimana unit-unit TNI mampu digerakkan secara masif untuk menyalurkan bantuan medis, mengamankan rantai pasok kebutuhan pokok, hingga mempercepat pelayanan kesehatan di berbagai wilayah terpencil.

Aktivitas ini, menurut Budhi, bukanlah deviasi dari tugas militer, melainkan perwujudan nyata dari profesionalisme modern yang responsif terhadap kebutuhan negara.

Menjaga Batas Demarkasi Politik

Meskipun mendukung perluasan peran militer dalam aspek non-konvensional, Budhi memberikan catatan penting. Adopsi new professionalism di era demokrasi tidak boleh menjadi pembenaran bagi institusi militer untuk kembali masuk ke ranah politik praktis.

TNI harus tetap berkomitmen menjunjung tinggi supremasi sipil, tunduk pada hukum dan konstitusi, serta bergerak hanya atas dasar keputusan politik negara yang sah. Profesionalisme militer masa kini menuntut lahirnya prajurit yang memiliki kompetensi komprehensif: menguasai taktik tempur, tanggap teknologi, adaptif bekerja lintas sektoral, namun tetap memegang teguh disiplin netralitas politik.

Pada akhirnya, bagi Indonesia, teori Huntington dan Stepan tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru saling melengkapi. Indonesia membutuhkan tentara yang tidak hanya tangguh dan bertaraf dunia di medan perang, tetapi juga adaptif serta tanggap dalam menjaga stabilitas domestik.

“Profesionalisme militer Indonesia bukan semata-mata tentang mengelola kekuatan bersenjata, tetapi juga menghadirkan rasa aman, memperkuat ketahanan nasional, serta menjaga keberlangsungan pembangunan bangsa,” pungkas Budhi dalam tulisan ilmiahnya. Melalui integrasi ini, TNI diharapkan mampu memikul peran ganda secara seimbang: sebagai institusi pertahanan (war fighting institution) sekaligus institusi pelindung kedaulatan bangsa (nation safeguarding institution).